

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	v
ABSTRAK	viii
ABSTRACT	ix
DAFTAR ISI	x
DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	xiii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	7
1.3. Tujuan Penelitian	7
1.4. Manfaat Penelitian	8
1.5. Metode Penelitian.....	8
1.5.1. Tipe Penelitian Hukum	8
1.5.2. Pendekatan Masalah	9
1.5.3. Sumber Bahan Hukum	10
1.5.4. Prosedur Pengumpulan Bahan Hukum.....	11
1.5.5. Analisis Bahan Hukum.....	11
1.6. Sistematika Penulisan	11

BAB II.....	13
BARANG JASA TITIP DARI LUAR NEGERI SEBAGAI OBJEK PAJAK	
PERTAMBAHAN NILAI	13
2.1 Dasar Hukum Usaha Jasa Titip	13
2.2. Pajak-Pajak Terkait Usaha Jasa Titip.....	15
2.3. Karakteristik Pajak Pertambahan Nilai	17
2.4. Subyek dan Obyek Pajak Pertambahan Nilai Barang Jasa Titip dari Luar Negeri ²³	
2.4.1. Subyek Pajak Pertambahan Nilai	23
2.4.2. Obyek Pajak Pertambahan Nilai.....	24
2.4.3. Karakteristik Barang Jasa Titip Dari Luar Negeri Sebagai Obyek Pajak Pertambahan Nilai.....	26
2.5. Tata Cara Pemungutan Pajak Pertambahan Nilai Terhadap Barang Jasa Titip dari Luar Negeri	28
BAB III	33
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP WAJIB PAJAK ATAS BARANG JASA	
TITIP DARI LUAR NEGERI.....	33
3.1 Penegakan Hukum Administrasi.....	33
3.1.1 Penegakan Hukum Preventif.....	34
3.1.2 Penegakan Hukum Represif.....	37
3.2. Penegakan Hukum Pidana	43

3.3. Analisis Pemungutan Dan Penegakan Hukum Terhadap Wajib Pajak Atas Barang Jasa Titip Dari Luar Negeri	47
BAB IV	55
PENUTUP.....	55
4.1. Kesimpulan	55
4.2. Saran.....	56
DAFTAR BACAAN.....	58

DAFTAR PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3612).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3821).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 3984).

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara 4189).

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara 4661).

Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2008 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi Berupa Denda Di Bidang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4838).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 197/PMK.03/2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 68/PMK.03/2010 tentang Batasan Pengusaha Kecil Pajak Pertambahan Nilai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1521).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 182/PMK.04/2016 tentang Ketentuan Impor Barang Kiriman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1819).

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 203/PMK.04/2017 tentang Ketentuan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1900).

Peraturan Direktur Jenderal Bea Dan Cukai Nomor: PER-09/BC/2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Ekspor Dan Impor Barang Yang Dibawa Oleh Penumpang Dan Awak Sarana Pengangkut.